



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

TAHUN 2023



DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN SIJUNJUNG

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKJiP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung Tahun 2023 dapat tersusun.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKJiP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung Tahun 2023, dimaksudkan sebagai media pertanggungjawaban keberhasilan dan atau kegagalan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi sesuai Rencana Kinerja yang telah ditetapkan.

Subtansi LKJiP ini menginformasikan capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung Tahun 2023, yang terkait dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2023, yang sekaligus merupakan laporan akuntabilitas kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan merupakan mata rantai capaian kinerja dari tahun-tahun sebelumnya.

Dengan diterbitkannya LKJiP Tahun 2023 ini, diharapkan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung dapat memberikan informasi, gambaran dan manfaat yang nyata, akurat, relevan dan transparan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Akhir kata, kami berharap agar LKJiP Tahun 2023 ini, dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja dan media evaluasi untuk menilai kinerja bagi Aparatur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung.

Muaro Sijunjung, Januari 2024
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

RONI SATRIA, S.STP, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19771024 199703 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Gambaran organisasi	1
1.1.1 Dasar Pembentukan Organisasi	1
1.1.2 Tupoksi	1
1.1.3 Struktur Organisasi.....	6
1.1.4 SDM	7
1.2 Aspek Strategis Organisasi	8
1.3 Permasalahan utama (strategic issued) yang dihadapi organisasi	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
2.1 Rencana Strategis	14
2.2 Tujuan dan Sasaran	15
2.3 Strategi dan arah Kebijakan	17
2.4 Indikator Kinerja Utama	19
2.5 Rencana Kerja Tahunan	22
2.6 Perjanjian Kinerja Perubahan 2023	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	26
3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja.....	26
3.2 Hasil Pengukuran Kinerja	28
3.3 Analisa capaian kinerja organisasi	29
3.3.1 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahunan	29
3.3.2 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu	33
3.3.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapatv dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	34
3.3.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar provinsi dan standar nasional	35
3.3.5 Analisa penyebab keberhasilan/kegagala atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	35
3.3.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	39
3.3.7 Analisa Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja ..	40

3.4 Realisasi Anggaran	40
BAB IV PENUTUP.....	48

LAMPIRAN :

1. Perjanjian Kinerja Perubahan
2. Pohon Kinerja
3. Cascading
4. Renstra
5. Matrik Tindak Lanjut LHE Tahun 2023

DAFTAR TABEL

1.1 Jumlah Pegawai pada Dinas Pengendalian Penduduk & KB.....	7
2.1 Keterkaitan Hubungan Misi,Tujuan, Indikator tujuan, Sasaran dan indikator sasaran pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2026	14
2.2 Keterkaitan Hubungan Misi, Tujuan, Sasaran Strategi dan Arah kebijakan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2026.....	15
2.3 Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab.Sijunjung Tahun 2021 – 2026.....	17
2.4 Rencana Kerja Tahunan Tahun 2023.....	19
2.5 Perjanjian Kinerja (PK) 2023.....	22
3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	27
3.2 Capaian Kinerja Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung pada Tahun2023...	28
3.3 Target dan realisasi serta capaian Sasaran 1.....	29
3.4 Target dan realisasi serta capaian Sasaran 2.....	30
3.5 Target dan realisasi serta capaian Sasaran 3.....	31
3.6 Realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun ini dengan beberapa Tahun terakhir	33
3.7 Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah	34
3.8 Realisasi kinerja tahun ini dengan standar provinsi dan standar nasional	35
3.9 Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, realisasi serta capaian pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2023	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Organisasi

1.1.1 Dasar Pembentukan Organisasi

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor : 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

1.1.2 Tupoksi

Kepala Dinas

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. Penyelenggaraan fasilitasi urusan pemerintahan dan pelayanan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

- c. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh organisasi di lingkungan Dinas;
- d. Pembinaan, supervisi dan pelaksanaan tugas bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- e. Pengawasan dan pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Dinas; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Sekretariat

Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional, memberikan layanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkup Dinas yang meliputi urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Sekretariat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan bahan perencanaan kegiatan, anggaran, tata kelola, administrasi, aset dan kepegawaian Dinas;
- b. penyelenggaraan tugas program, keuangan, umum dan kepegawaiandinas;
- c. pengaturan dan koordinasi perumusan program, kegiatan dan laporan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
- d. pelaksanaan evaluasi, supervisi, dan pengawasan program kegiatan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan bahan perencanaan kebutuhan umum dan kepegawaian Dinas;
- b. penyusun norma, indikator, kriteria dan pedoman penyelenggaraan kegiatan umum dan kepegawaian Dinas
- c. pengaturan dan koordinasi perumusan program kegiatan umum dan kepegawaian Dinas;
- d. pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian Dinas;
- e. penyimpanan berkas kegiatan umum dan kepegawaian; dan
- f. pelaksanaan program dan kegiatan umum dan kepegawaian serta menyiapkan data dan informasi administrasi.

Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun program dan rencana pengelolaan keuangan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- b. mempelajari dan menelaah peraturan keuangan;
- c. menyusun rencana kegiatan belanja langsung dan tidak langsung;
- d. memproses dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan;
- e. menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan;
- f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan kegiatan;
- g. menyiapkan bahan pertanggungjawaban dan menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. menyiapkan dan memelihara dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- i. melaksanakan penatausahaan keuangan;
- j. menyusun laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- k. melaksanakan kegiatan penyusunan perencanaan dan pelaporandinas; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Penggerakan

Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Penggerakan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis dibidang pengendalian kuantitas penduduk, advokasi dan penggerakan.

Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Advokasi dan Penggerakan mempunyai tugas menyiapkan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan advokasi dan penggerakan.

Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga mempunyai tugas menyiapkan, menghimpun dan melaksanakan program dan kegiatan pengendalian penduduk dan informasi keluarga. asan lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Keluarga Berencana

Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan program dan kegiatan Keluarga Berencana.

Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pelayanan Keluarga Berencana mempunyai tugas menyiapkan, menyusun dan

melaksanakan pelaksanaan program dan kegiatan Pelayanan Keluarga Berencana .

Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas menyusun, menyiapkan dan melaksanakan program dan kegiatan kesehatan reproduksi.

Bidang Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga

Bidang Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan program dan kegiatan keluarga sejahtera dan pembangunan keluarga.

Kelompok jabatan Sub Substansi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas menyiapkan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera.

Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Bina Ketahanan Keluarga mempunyai tugas menyiapkan, menyusun dan melaksanakan program kegiatan Bina Ketahanan Keluarga

1.1.3 Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas terdiri atas :

A. Kepala Dinas

B. Sekretariat membawahi :

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian dan
2. Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan

C. Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Penggerakan membawahi :

1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Advokasi dan Penggerakan
2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga

D. Bidang Keluarga Berencana membawahi :

1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pelayanan Keluarga Berencana dan
2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Kesehatan Reproduksi

E. Bidang Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga membawahi :

1. Kelompok jabatan Sub Substansi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera
2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Bina Ketahanan Keluarga

Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud diatas dapat dilihat pada tabel berikut :

1.1.4 SUMBER DAYA MANUSIA

Adapun Dnas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh personil yang berjumlah 21 orang PNSD dan tenaga PKB, PLKB sebanyak 19 orang yang merupakan pegawai pusat yang diberdayakan di daerah. Jumlah ini tidaklah sebanding dengan kinerja yang diberikan kepada Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana.

Tabel 1.1. Jumlah Pegawai pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Uraian	Jumlah (orang)
1	Jumlah Pegawai	31
	PNS	20
	Non PNS	11
2	Kualifikasi Pendidikan (PNS)	
	- S2	2
	- S1 / D4	14
	- D1/D III	3
	- SLTA	1
	- SLTP	-
	- SD	-
3	Kualifikasi Pendidikan (THL)	11
	- S2	-
	- S1 / D4	5
	- D1/D III	3
	- SLTA	3
	- SLTP	-
	- SD	-

4	Pejabat Struktural	
	- Eselon II.b	1
	- Eselon III.a	1
	- Eselon III.b	3
	- Eselon IV.a	2
	- Eselon IV.b	-

1.2 Aspeg Strategis Organisasi

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan kewajibannya secara konkuren terbagai menjadi kewenangan pusat, provinsi, kabupaten dan kota. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dioperasionalkan dalam program Bangga Kencana bertujuan untuk mewujudkan keluarga berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang.

Sejalan dengan itu dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mendukung misi ke 1 yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif, efisien dan responsif berbasis reformasi birokrasi dan misi ke 3 yaitu meningkatkan kualitas SDM yang cerdas, sehat dan produktif berbasis teknologi dalam tatanan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah (ABS-SBK) yang merupakan sasaran strategis Pemda. Selanjutnya yang menjadi sasaran strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai

tugas pokok dan fungsi yaitu terwujudnya pertumbuhan penduduk yang seimbang dan meningkatnya kualitas keluarga.

1.3 Permasalahan Utama (strategic Issued) yang dihadapi Organisasi

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, karena dampaknya yang signifikan bagi daerah/ masyarakat dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau bisa juga tidak dimanfaatkan, sehingga akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Identifikasi isu strategis dapat dilihat dari sisi eksternal maupun internal. Sisi eksternal terkait dengan dinamika Nasional, Provinsi, OPD, dan Lembaga atau Instansi di luar organisasi. Sedangkan sisi internal terkait dengan dinamika di dalam organisasi itu sendiri yang diperkirakan akan menjadi permasalahan maupun tantangan dimasa yang akan datang.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung merupakan unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Sijunjung, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. Identifikasi isu-isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung dapat dilihat sebagai berikut:

1. Prevalensi stunting masih tinggi.

Stunting (gagal tumbuh) merupakan ancaman utama terhadap kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Hal ini dikarenakan anak yang gagal tumbuh ini, bukan hanya mengganggu pertumbuhan fisik saja, tetapi juga mengganggu perkembangan otaknya. Hal ini selain mempengaruhi kemampuan dan prestasi di sekolah, juga mempengaruhi produktivitas dan kreativitas di usia-usia produktif. Angka prevalensi stunting di kabupaten Sijunjung berdasarkan SSGI 2022 yaitu 30,00% dari hasil e-PPGBM aplikasi elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi berbasis masyarakat angka stunting Kabupaten Sijunjung sudah diangka 21 % dan masih diperlukan upaya penurunan sebesar 7% lagi menjadi 14 % di Tahun 2024

2. Bonus Demografi.

Pembangunan Indonesia dalam periode 2020-2024 ditujukan untuk membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu SDM yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan pembangunan diarahkan diantaranya melalui peningkatan produktivitas angkatan kerja, serta peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda.

Salah satu faktor penentu terciptanya struktur penduduk yang diinginkan adalah pengendalian angka kelahiran total/total fertilityrate (TFR).

Dalam jangka waktu yang relatif panjang, angka kelahiran ini menjadi salah satu penentu struktur penduduk. Struktur penduduk Indonesia saat ini ditandai dengan meningkatnya proporsi penduduk usia produktif. Kondisi ini membuka peluang bagi Indonesia untuk mendapatkan bonus demografi (demographic dividen) dengan salah satu prasyarat yang harus terpenuhi, yaitu tersedianya SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Struktur penduduk seperti ini harus dijaga dan dimanfaatkan dengan baik. Salah satunya adalah dengan menjaga agar TFR berada pada level tertentu sehingga

bonus demografi dapat menjadi suatu kondisi yang dapat dimanfaatkan dalam lintas sektor pembangunan.

3. Belum tergarapnya Kampung Keluarga berkualitas dalam mensukseskan Program Bangga Kencana. Untuk mensukseskan Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan keluarga Berencana (Bangga Kencana) perlunya dukungan dan peran serta lintas sektor/ stake holder terkait karena kampung keluarga berkualitas bisa terwujud melalui integrasi program di berbagai sektor.
4. Rendahnya pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga.

Kesehatan Reproduksi Remaja merupakan topik yang perlu diketahui oleh masyarakat khususnya pada remaja agar mereka memiliki informasi yang benar mengenai proses reproduksi serta berbagai faktor yang ada di sekitarnya, sehingga diharapkan remaja memiliki sikap dan tingkah laku yang bertanggung jawab.

Kurangnya sosialisasi dan edukasi kesehatan reproduksi dapat memicu terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, diantaranya penyakit seksual menular, kehamilan di usia muda, hingga aborsi yang dapat mengakibatkan morbiditas bahkan mortalitas ibu. Angka kelahiran umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR) juga masih relatif tinggi,

meskipun penurunannya cukup signifikan dari tahun ke tahun.

Kendala yang masih ada yaitu rendahnya pemahaman remaja dan calon pengantin terkait kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga. Pemberian informasi yang disesuaikan dengan usia dan kesiapan anak/remaja dapat meningkatkan pemahaman mereka atas sistem, proses, fungsi alat reproduksi dan cara menjaga kesehatan reproduksinya, serta meningkatkan pemahaman atas konsep perencanaan kehidupan berkeluarg

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis pada hakekatnya merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul atau dengan kata lain Rencana Strategis itu adalah perencanaan suatu organisasi/lembaga yang menentukan strategi atau arahan, dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan anggaran termasuk sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan 2026, dan telah dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk priode 1 (satu) tahun sebagai implementasi dalam pelaksanaan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026.

Sebagai bentuk nyata dalam mewujudkan misi RPJMD yang telah disusun, maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung menyusun tujuan dan sasaran, sebagai berikut:

2.2 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu capaian atau hasil dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi yang telah ditetapkan serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Dengan diformulasikannya tujuan ini, maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat secara tepat memahami apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu 1-5 tahun. Lebih dari itu perumusan tujuan ini juga memungkinkan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah dicapai.

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
- 2) Menurunnya Prevalensi Stunting
- 3) Meningkatnya kualitas birokrasi yang efektif, efisien, akuntabel dan profesionalisme.

Sasaran merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang dialokasikan pada setiap tahunnya, melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kinerja (*Performance plan*). Penetapan sasaran ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan tiap tahunnya untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

Adapun sasaran yang ingin dicapai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya Pertumbuhan Penduduk yang seimbang
- 2) Meningkatnya kualitas keluarga
- 3) Meningkatnya akuntabilitas Kinerja organisasi.

Keterkaitan hubungan Misi, Tujuan dan Sasaran pada tahun 2021-2026 pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 2.1

Keterkaitan Hubungan Misi, Tujuan, Indikator tujuan, Sasaran dan indikator sasaran pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2026

Misi Ketiga (3)	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas, sehat dan produktif berbasis teknologi dalam tatanan ABS-SBK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 2. Menurunnya Prevalensi Stunting 3. Meningkatnya kualitas birokrasi yang efektif, efisien, akuntabel dan profesionalisme. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usia Harapan Hidup 2. Prevalensi balita stunting 3. Nilai Sakip Pemda 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya pertumbuhan penduduk yang seimbang 2. Meningkatnya kualitas keluarga 3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Angka Kelahiran Total/ Total Fertility Rate (TFR) 2. Indeks Pembangunan Keluarga (i bangsa) 3. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

2.3 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan rencana strategis, telah dirumuskan dan diuraikan terhadap sasaran dan indikator kinerja yang akan dicapai setiap tahunnya. Dalam rangka pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan, pada masing–masing bidang, tentunya diperlukan strategi dan kebijakan yang tepat agar target yang diberikan dapat direalisasikan. Untuk meujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai sesuai dengan visi dan misi maka dilakukan strategi dan arah kebijakan antara lain yaitu :

Tabel 2.2

Keterkaitan Hubungan Misi, Tujuan, Sasaran Strategi dan Arah kebijakan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2026

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas, sehat dan produktif berbasis teknologi dalam tatanan ABS-SBK	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1. Terwujudnya pertumbuhan penduduk yang seimbang	1. Membangun keluarga sehat dan sejahtera berbasis pemberdayaan	1. Perluasan akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi 2. Peningkatan kuantitas dan kualitas Program Kampung KB. 3. Peningkatan kualitas pembangunan keluarga yang produktif secara

		2.Meningkatnya kualitas keluarga	2. Meningkatkan kualitas sinergi lintas sector dan Pemerintah Nagari/Desa terkait upaya penanggulangan stunting	partisipatif. 1. membangun sistem manajemen data pencegahan dan penandatanganan stunting 2. Penerapan kebijakan daerah terkait upaya penanggulangan stunting secara efektif dan integrative. 3. Peningkatan kualitas perubahan perilaku untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman serta mendorong perubahan perilaku untuk mencegah stunting lebih intensif dan berkelanjutan. 4. Penciptaan aksi
--	--	----------------------------------	---	--

				<p>konvergensi untuk mencegah stunting kepada sasaran prioritas secara konvergen dengan menyelaraskan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian kegiatan lintas sector serta antar tingkat pemerintahan dan masyarakat.</p>
--	--	--	--	---

2.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama merupakan suatu ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, dalam hal ini termasuk OPD. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Sijunjung tahun 2021-2026, Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ditetapkan melalui Keputusan Bupati Sijunjung Nomor 188.45/482/KPTS-BPT-2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026.

Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Total Fertility Rate (TFR)
2. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)
3. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Tabel 2.3.
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
KAB. SIJUNJUNG TAHUN 2021 – 2026

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Baseline	Formula Perhitungan/ Penjelasan	Sumber Data
1.	Terwujudnya Pertumbuhan Penduduk Yang Seimbang	Total Fertiliti Rate (TFR)	Tingkat penurunan TFR adalah hal yang wajib masuk dalam IKU karena menyangkut Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Sijunjung. Dinas Pengendalian Penduduk dan KB adalah salah satu SKPD yang mempunyai tupoksi untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana	$TFR = 5 \sum_{i=1}^7 ASFR_i$ Ket: 5 x (Jumlah angka kelahiran menurut kelompok umur 5 tahunan dari usia ibu 15-49) dibagi 1000 Wanita usia 15-19 Thn.	Hasil Susenas Tahun 2021

			(Bangga Kencana)		
2.	Meningkatnya Kualitas Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) sangat penting dan sangat dibutuhkan untuk benar-benar menemukan permasalahan keluarga ke tingkat dasar/lebih detail sehingga penanganannya dapat dilakukan secara cepat untuk mewujudkan keluarga yang tenteram, mandiri dan bahagia	IBangga diukur melalui 3 dimensi yaitu ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan	Hasil pemutakhiran PK-23 Prov Sumbar
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja kementerian Negara Nomor PER/01 IM.PAN/01/2009, salah satu tugas dari Kementrian	Skala nilai AA range nilainya 99 – 100, A dengan nilai 80 – 90, BB nilai 70 – 80, B dengan nilai 60 – 70, untuk CC, 50 – 60 dan C dengan range nilai 30 - 50	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

			Pendayagunaan Aparatur Negara adalah melakukan penguatan akuntabilitas kinerja instansi – instansi pemerintahan. Usaha – usaha penguatan akuntabilitas kinerja dan sekaligus peningkatannya, dilakukan antara lain melalui Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)		
--	--	--	---	--	--

2.5 RENCANA KERJA TAHUNAN

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan didalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui berbagai Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan setiap tahunnya Penyusunan Rencana Kinerja dimaksud dituangkan melalui Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung Tahun 2023 adalah untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan

kegiatan. Untuk itu penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung harus berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026 maupun Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026

Tabel 2.4

**RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2023
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN SIJUNJUNG**

	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA OPD	TARGET OPD
	Terwujudnya Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang	Angka Kelahiran Total Total Fertility Rate (TFR)	2,22
	Meningkatnya kualitas Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	55,80
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	75,00

2.6 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempersentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan menyusun Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung Tahun 2023 adalah sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2.5. Perjanjian Kerja Perubahan Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA OPD	TARGET OPD	KET
1	Terwujudnya Pertumbuhan Penduduk yang seimbang	Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)	2,22	-
2	Meningkatnya Kualitas Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	55,85	-
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	75,00	-

	PROGRAM	ANGGARAN	KE T
	Program Pengendalian Penduduk	211. 943.050	
	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.644.82 9.640	
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	2.702.16 5.501	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.971.53 9.794	
	JUMLAH	7.530.47 7.985	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja

Pada sub bab ini disajikan metodologi pengukuran capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, Selanjutnya setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Misi dan Visi Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah Capaian indikator kinerja utama (IKU) dan capaian indikator kinerja strategis diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing.

Sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja

pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran Penilaian capaian kinerja didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas.

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Kerangka Pengukuran kinerja pada Pemerintah Kabupaten Sijunjung dilakukan dengan mengacu pada Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan kriteria sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi
2.	76 % ≤ 90 %	Tinggi
3.	66 % ≤ 75 %	Sedang
4.	51 % ≤ 65 %	Rendah
5.	≤ 50 %	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut :

1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

2. Hasil Sedang

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

3. Hasil Rendah dan Sangat Rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan

3.2 Hasil Pengukuran Kinerja

Adapun tingkat capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung pada Tahun 2023 berdasarkan hasil pengukuran dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung pada Tahun 2023

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
1	Terwujudnya Pertumbuhan Penduduk yang seimbang	Total Fertility Rate (TFR)	%	2,22	2,83	72,52	Sedang
2	Meningkatnya kualitas keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	%	55,80	58,81	105,40	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya Akuntabilitas Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	%	75.00	73,50 Hsl review Kinerja 2022	98.00	Sangat Tinggi
<p>Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023 (diolah)</p>							

3.3 Analisa Capaian Kinerja Organisasi

Setelah dilakukan pengukuran kinerja, maka selanjutnya diadakan evaluasi dan analisis tentang pencapaian sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung agar dapat gambaran atas kegagalan dan keberhasilan atas pencapaian target indikator pada tiap-tiap sasaran, adapun evaluasi dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator sasaran adalah sebagai berikut :

3.3.1 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2023

Sasaran 1

Terwujudnya pertumbuhan penduduk yang seimbang

Tabel 3.3 Target dan Realisasi serta capaian Sasaran 1

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
	Terwujudnya Pertumbuhan Penduduk yang seimbang	Total Fertility Rate (TFR)	%	2,22	2,83	72,52	Sedang

Dari tabel di atas diketahui bahwa Indikator Kinerja Sasaran yang mendukung Sasaran 1 yaitu Total Fertility Rate pada Tahun 2023 ditargetkan sebesar 2,22 terealisasi sebesar 2,83 dengan Capaian sebesar 72,52 %. Total Fertility Rate (TFR) Kabupaten Sijunjung Tahun 2023 data bersumber dari hasil Susenas Tahun 2021, Angka TFR ini dibagi dengan target IKU tahun 2023 yaitu 2,22 didapatkan capaian sebesar 72,52 % dengan kategori **Sedang**.



Kegiatan Pelayanan KB kepada Akseptor di Kecamatan Kamang Baru

Sasaran 2

Meningkatnya Kualitas Keluarga

Tabel 3.4 Target dan Realisasi serta capaian Sasaran 2

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
	Meningkatnya kualitas keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	%	55,80	58,81	105,40	Sangat berhasil

Dari tabel di atas diketahui bahwa Indikator Kinerja Sasaran yang mendukung Sasaran 2 yaitu Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) ditargetkan sebesar 55,80 terealisasi sebesar 58,81 dengan Capaian sebesar 105,40 % dan termasuk predikat "Sangat Tinggi "

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas keluarga (IBangga) yang diukur melalui 3 dimensi yaitu ketentraman 55,63%, kemandirian 52,47 % dan kebahagiaan 68,32 % (Hasil Pemutakhiran PK-23 Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2023)



Kegiatan Poktan Kampung Keluarga berkualitas



Kegiatan Hari Keluarga Nasional di kab Sijunjung Th 2023 **Sasaran 3**

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Tabel 3.5 Target dan Realisasi serta capaian Sasaran 3

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
	Meningkatnya Akuntabilitas Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	%	75.00	73.50 Hasil Review Kinerja 2022	98.00	Sangat Tinggi

Dari tabel di atas diketahui bahwa untuk sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Organisasi dengan indikator Nilai evaluasi akuntabilitas Kinerja pada tahun 2023 mempunyai target 75.00 realisasi menunggu hasil review APIP dengan sasaran Kegiatan :

- 1) Meningkatkan Kualitas perencanaan dan pelaporan Organisasi,
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan internal organisasi,
- 3) Meningkatkan kualitas penatausahaan keuangan,

- 4) Meningkatnya pengawasan Internal Organisasi..
- 5) Meningkatnya pengelolaan aset OPD
- 6) Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian



Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-Undangan

3.3.2 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun ini dengan beberapa Tahun lalu

Tabel 3.6 realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun ini dengan beberapa Tahun terakhir

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	Tahun 2021		% Capaian	Tahun 2022		% Capaian	Tahun 2023		% Capaian	Kategori	Target 2024
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi			
Total Fertility Rate (TFR)	%	2,22	2,95	67,12	2,22	2,83	72,5	2,22	2,83	72,52	Sedang	2,22
Meningkatnya kualitas keluarga	%	55,73	53,24	95,5	55,75	53,24	95,5	55,80	58,81	105,40	Sangat Tinggi	55,85
Meningkatnya Akuntabilitas Organisasi	%	73,37	73,37	100	73,37	71,45	97,38	75,00	73,50	Hasil review Kinerja 2022 98,00	Sangat Tinggi	76,50

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023 (diolah)

3.3.3 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 3.7 Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	Tahun 2021		Capaian	Tahun 2022		% Capaian	Tahun 2023		% Capaian	Kategori	Target 2024
		Target pada Rens tra	Realisasi		Target pada Rens tra	Realisasi		Target pada Rens tra	Realisasi			
Total Fertility Rate (TFR)	%	2,22	2,95	67,12	2,22	2,83	72,5	2,22	2,83	72,52	Sedangl	2,22
Meningkatnya kualitas keluarga	%	55,73	53,24	95,5	55,75	53,24	95,5	55,80	58,81	105,40	Sangat Tinggi	55,85
Meningkatnya Akuntabilitas Organisasi	%	73,37	73,37	BB	74,50	71,45	BB	75,00	73,5 Hasil Reviue Kinerja Tahun 2022	98,00	Sangat Tinggi	76,50

3.3.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar provinsi dan standar nasional

Tabel 3.8 realisasi kinerja tahun ini dengan standar provinsi dan standar nasional

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Standar Nasional	Standar Provinsi	Realisasi 2023
1	Terwujudnya Pertumbuhan Penduduk yang seimbang	Total Fertility Rate (TFR)	%	2,10	2,19	2,83
2	Meningkatnya kualitas keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	%	61,00	59,00	58,81

3.3.5 Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor pendukung keberhasilan capaian sasaran 1 yaitu terwujudnya pertumbuhan penduduk yang seimbang :

1. Meningkatkan Komunikasi, informasi dan aplikasi (KIE) program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) terutama kepada remaja melalui PIK-R yang ada di sekolah-sekolah.
2. Mengintegrasikan Pelaksanaan Program Bangga Kencana, untuk mencapai hasil yang maksimal dalam pelayanan program Bangga Kencana perlu dilakukan koordinasi dan kerjasama dengan stake holder terkait

sehingga pelaksanaan program Bangga Kencana dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator ini :

1. Kurangnya personil/ tenaga Penyuluh Keluarga Berencana dalam melakukan KIE yang mengakibatkan kurang maksimalnya penggarapan wilayah kerja.
2. Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga berencana (Bangga Kencana) melalui Kampung KB belum tergarap secara bersama melalui stake holder terkait

Strategi Pemecahan masalah :

1. Melakukan Rapat Koordinasi bersama dengan stake holder terkait tentang pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga berencana (Bangga Kencana)
2. Memanfaatkan secara maksimal / tenaga PKB yang ada serta memberdayakan tenaga kader PPKBD dan Sub PPKBD dan Poktan.

Faktor pendukung keberhasilan capaian sasaran 2 Meningkatnya kualitas keluarga :

1. Meningkatnya pelayanan Keluarga Berencana. Dalam meningkatkan pelayanan Keluarga Berencana kedepan kepada para petugas pelayanan, kader-kader di Kecamatan Nagari ataupun Jorong perlu dilakukan pembinaan-pembinaan sehingga pelayanan Keluarga Berencana betul-betul dapat bermanfaat dan berguna bagi masyarakat
2. Peningkatkan kerjasama dengan klinik KB baik pemerintah maupun swasta;

3. Meningkatkan kualitas ketahanan keluarga dan masyarakat.

Dalam upaya meningkatkan kualitas ketahanan keluarga dan masyarakat perlu dilakukan pembinaan-pembinaan dan pelatihan-pelatihan serta sosialisasi sehingga masyarakat akan lebih tahu tentang 8 Fungsi Keluarga sehingga terwujudnya keluarga yang sejahtera

4. Meningkatkan akses terhadap informasi pelayanan kesehatan reproduksi remaja.

Untuk menunjang terhadap pelayanan kesehatan reproduksi remaja perlu dilakukan pembinaan-pembinaan melalui media masa dan elektronik sehingga pelayanan kesehatan reproduksi remaja dapat langsung dirasakan oleh remaja dan masyarakat pada umumnya.

4. Meningkatkan tingkat kemandirian masyarakat dalam ber KB.

Dalam meningkatkan kemandirian masyarakat dalam ber KB perlu dilakukan pembinaan-pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat akan penting dan perlunya kita ber KB sehingga masyarakat akan lebih paham tentang manfaat ber KB dan dengan sendirinya tingkat kesadaran/kemandirian masyarakat juga akan semakin meningkat.

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indicator ini :

1. Masih kurangnya SDM Kader dalam melakukan KIE tentang Program Keluarga Berencana
2. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang 8 fungsi keluarga yang harus diterapkan dalam keluarga
3. Masih kurangnya pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi remaja

4. Masih tingginya angka stunting di Kabupaten Sijunjung yaitu 30,00 %
5. Masih rendahnya kesadaran ber KB terutama bagi pria dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap KB Medis Operasi Pria (MOP)

Strategi Pemecahan masalah :

1. Melakukan pelatihan dan pembinaan kepada Kader dan Poktan
2. Sosialisasi tentang 8 fungsi keluarga melalui kader BKB, BKR dan BKL serta UPPKA
3. Sosialisasi ke sekolah-sekolah tentang PIK Remaja
4. Melakukan berbagai inovasi, disamping melakukan orientasi kepada Tim Pendamping Keluarga /TPK juga dilakukan pemberian makanan tambahan yang bergizi serta bantuan pembuatan jamban sehat kepada keluarga yang mempunyai anak stunting dan ini kita lakukan kerjasama dengan Baznas kabupaten Sijunjung.
5. Sosialisai dan KIE kepada Pasangan Usia Subur (MOW dan MOP)

Faktor pendukung keberhasilan capaian sasaran 3 yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Organisasi antara lain :

1. Meningkatnya pengawasan intern dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi oleh unsur Pimpinan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana;
2. Adanya Indikator Kinerja Individu sampai ke level staf
3. Adanya Bimbingan teknis dan sosialisai dalam pencapaian kinerja organisasi

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indicator ini :

1. SDM aparatur masih belum optimal, sehingga masih adanya pejabat yang kurang memahami tentang cara mengukur kinerja, mengidentifikasi resiko serta pengendalian resiko yang mungkin akan terjadi dalam melaksanakan program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
2. Adanya Jabatan Fungsional yang tidak terisi pada Bidang-bidang, untuk mengisi kekosongan ini mengharuskan uji kompetensi terlebih dahulu.

Strategi Pemecahan masalah :

1. Berupa mengoptimalkan sumberdaya yang ada pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
2. Meningkatkan hubungan kerja dengan lintas sektor terkait dalam rangka pencapaian sasaran kinerja organisasi

3.3.6 Analisa atas efisiensi penggunaan Sumber daya

Dalam rangka mendukung pencapaian target/sasaran Program Nasional yaitu Bangsa Kencana serta penurunan stunting perlu didukung oleh sumber daya yang ada antara lain yaitu Sumber Daya manusia, keuangan, material/fisik dan teknologi, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berupaya semaksimal mungkin untuk memanfaatkan sumberdaya yang ada dalam rangka meujudkan/ mencapai tujuan baik nasional maupun daerah. Terkait dengan sumber daya manusia Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat memberdayakan serta kolaborasi dengan tenaga Penyuluh Keluarga Berencana dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana serta kader (BKB, BKR, BKL, PIK-R dan UPPKA serta PPKBD dan Sub PPKBD)

Selain sumber daya manusia, terkait dengan anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berusaha menerapkan prinsip efisien dan efektif dalam pelaksanaan program.

3.3.7 Analisa Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Selanjutnya dalam rangka mensukseskan Program Nasional yaitu program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Stunting melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana didukung oleh beberapa Program, kegiatan dan Sub Kegiatan antara lain yaitu Program Pengendalian Penduduk, Program Pembinaan Keluarga Berencana, Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) dan program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Semua Program, Kegiatan dan Sub kegiatan cukup mendukung dalam rangka mensukseskan Program Nasional tersebut yang ada di daerah dengan capaian kinerja memperoleh kategori berhasil dan sangat berhasil.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Selanjutnya dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Alokasi anggaran untuk mendukung Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebesar Rp. 7.353.176.812 yang terdiri dari dana APBD Rp. 3.864.956.812 dan DAK Non Fisik (BOKB) Rp.

3.488.220.000. Capaian atau realisasi adalah sebesar 6.576.716.860 atau 87,33 % sebagaimana tabel dibawah ini :

TABEL 3.9
Uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator, Target,
dan Capaian atau Realisasi

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksanaan	Uraian Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub.Kegiatan	Target	Realisasi		
						Fisik	Keuangan	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	8
1	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah Anggaran : 2.971.539.794	100 %	100 %	2.539.206.591	85,45
1			KEGIATAN : PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH					
			Sub Kegiatan :					
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah : Anggaran : 8.283.450	3 dokumen	3 dokumen	8.184.450	98,80
			Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD Anggaran : 894.450	2 dokumen	2 dokumen	894.450	100
2			KEGIATAN : ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH					
			Sub Kegiatan :					
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN Anggaran : 2.400.437.536	19 orang	19 orang	2.015.726.676	83,97
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	3.471.200	70,88

				Anggaran : 4.897.050				
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semester SKPD Anggaran : 39.499.950	17 laporan	17 laporan	39.480.950	99,95
3			ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH					
			Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan Anggaran : 16.500.000	29 orang	29 orang	16.500.000	100
			Bimbingan Teknis Implementasi peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Anggaran : 60.923.700	70 orang	70 orang	50.531.700	82,94
4			KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH					
			Sub Kegiatan :					
			Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan Anggaran: 51.191.900	12 paket	12 paket	50.952.850	99,53
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Jumlah dana ; 11.149.300	12 paket	12 paket	6.944.600	62,29
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Anggaran : 85.702.028	1 laporan	1 laporan	78.088.333	91,12
			Fasilitas kunjungan tamu	Jumlah Laporan fasilitas kunjungan tamu Anggaran : 5.648.800	1 laporan	1 laporan	2.180.900	38,61
5			KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH					
			Sub Kegiatan :	Jumlah dana :				
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan Anggaran : 50.900.000	1 Unit	1 unit	49.890.000	98,02 %
6			KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN					

			PEMERINTAHAN DAERAH					
			Sub Kegiatan :	Jumlah dana :				
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan : Anggaran :36.839.330	3 Laporan	3 Laporan	31.134.750	84,51
			Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Anggaran : 14.314.000	1 laporan	1 laporan	12.920.000	90,26
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan Anggaran : 13.882.932	1 Laporan	1 Laporan	13.526.500	97,43
7			KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					
			Sub Kegiatan :	Jumlah dana :				
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya Anggaran : 152.465.368	38 Unit	38 Unit	142.964.432	93,77
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara Anggaran : 18.010.000	53 Unit	53 Unit	11.445.000	63,55
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Anggaran : 211.943.050	100 %		194.332.720	91,69
			KEGIATAN PEMANDUAN DAN SINGKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DENGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK					
			Sub Kegiatan :	Jumlah dana :				
			Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang mendapatkan advokasi, sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal Anggaran : 28.272.400	5 Satuan Pendidikan	5 Satuan Pendidikan	22.724.600	80,38
			KEGIATAN PEMETAAN PERKIRAAN PENGENDALIAN					

			PENDUDUK CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Sub Kegiatan :	Jumlah dana :				
			Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah laporan pencatatan dan pengumpulan data keluarga Anggaran : 60.719.650	1 Laporan	1 Laporan	56.098.720	92,39
			Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Anggaran : 122.951.000	1 Dokumen	1 Dokumen	115.509.400	93,95
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA	Anggaran : 2.702.165.501	100 %		2.247.961.849	83,19
			KEGIATAN PELAKSANAAN ADVOKASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB SESUAI KEARIFAN BUDAYA LOKAL					
			Sub Kegiatan :					
			Advokasi Program kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Terlaksananya Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Anggaran : 1.500.000	12 Organisasi	12 Organisasi	1.485.800	99,05
			Komunikas, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal Anggaran : 175.419.400	2 Dokumen	2 Dokumen	175.369.750	99,97
			Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Anggaran : 153.257.400	3 Dokumen	3 Dokumen	140.284.200	91,54
			Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Terlaksananya Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Laporan	1 Laporan	182.624.162	80,90

				Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) Anggaran : 225.730.950				
			Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Anggaran : 555.251.000	8 Laporan	8 Laporan	514.566.287	92,67
			Pengendalian Program KKBPK	Terlaksananya Pengendalian Program KKBPK Anggaran : 91.816.300	2 Laporan	2 Laporan	82.097.550	89,42
			Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Anggaran : 56.968.600	18 Laporan	18 Laporan	45.437.850	79,76
			Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Anggaran : 753.955.800	933 org	933 org	437.442.650	58,02
			Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Anggaran : 55.995.001	1 Laporan	1 Laporan	45.732.400	81,67
			KEGIATAN PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI/ KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN DAN PEMBINAAN KESERTAAN BER-KB					
			Sub Kegiatan :	Jumlah dana :				
			Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	62 Kmp KB	62 Kmp KB	599.649.000	94,84

				Anggaran : 632.271,050				
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Jumlah dana : Rp 1.644.829.640	100%		1.622.857.700	98,66
			KEGIATAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA					
			Sub Kegiatan :	Jumlah dana :				
		1	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor/UPPKA)	Jumlah unit sarana kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor/ UPPKA yang tersedia Anggaran : 365.993.550	30 unit	30 unit	356.957.750	97,53
		2	Orientasi dan pelatihan teknis pengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor/UPPKA)	Jumlah hasil Orientasi dan pelatihan teknis pengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor/UPPKA) Anggaran : 131.381.018			127.371.250	96,95
		3	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor/UPPKA)	Jumlah kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor/ UPPKA yang mendapat biaya operasional kegiatan Anggaran :987.800.100	468 orang	468 orang	983.870.350	99,60
		4	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor/UPPKA)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor/ UPPKA) yang mendapatkan biaya operasional kegiatan Anggaran : 13.959.572	26 kelom pok	26 kelom pok	11.206.600	80,28
		5	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor/UPPKA)	Jumlah laporan hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R Usaha Peningkatan	1 laporan	1 laporan	33.020.500	98,80

				Pendapatan Keluarga Akseptor/UPPKA Anggaran : 33.420.450				
		6	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah laporan hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) Anggaran : 50.450.550	1 Laporan	1 Laporan	50.403.000	99,91
			KEGIATAN PELAKSANAAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA.					
			Sub Kegiatan :	Jumlah dana :				
			Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah laporan hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja Anggaran : 61.824.400	1 Laporan	1 Laporan	60.028.250	97,09

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung tahun 2023, dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung telah memperlihatkan pencapaian kinerja atas sasaran strategisnya. Hasil analisa dari 3 (tiga) sasaran dengan 3 indikator kinerja sasaran diketahui bahwa hasil analisis pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2023, diketahui 1 (satu) indikator sasaran **sangat tinggi** dan 1 (satu) indikator sasaran **sedang**, sedangkan 1 (satu) indikator sasaran menunggu masih menunggu hasil review APIP

Upaya atau langkah kedepan yang dilakukan dalam pencapaian sasaran kinerja adalah memperbaiki Pohon Kinerja serta menetapkan indikator kinerja yang tepat, sebagaimana yang telah dilakukan pendampingan oleh tim sakip untuk Tahun 2024 ini Indikator Kinerja Utama (IKU) menjadi 4 IKU, yang mana sebelumnya / Tahun 2023 ada 3 Indikator Kinerja Utama sebagaimana yang telah diuraikan diatas. Begitu juga dengan cascading telah mengacu kepada Pohon Kinerja dan telah disesuaikan dengan program, Kegiatan serta Sub Kegiatan Tahun 2024. Selanjutnya terkait dengan Perjanjian Kinerja (PK) sasaran dan indikator sasaran Tahun 2024 juga telah mengacu atau sesuai dengan cascading yang baru hasil pendampingan.

Dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam RENSTRA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026 khususnya untuk Tahun

Anggaran 2023, dapat dipenuhi namun kedepanya dalam rangka meujudkan Program Nasional yaitu Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga berencana (Bangga Kencana) serta Stunting perlunya dukungan dan kerjasama lintas sektor terkait sehingga program tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang telah diuraikan ini Demikianlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung yang dilaksanakan selama Tahun 2023 semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/ evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang, terima kasih.

Muaro Sijunjung, Januari 2024

KERALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA



RONI SATRIA, S.STP, M.Si
NIP. 197710 24 199703 1002

Telah Diverifikasi / Reviu / Evaluasi				
PIC	Bappedada	Bagor	Inspektorat	Sekda
<i>Caf.</i>	<i>27/3/24</i>	<i>28/3/24</i>	<i>27/3/24</i>	<i>6/3/24</i>



PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
INSPEKTORAT DAERAH
Alamat : Jln. Ir. Juanda No. 3 Telp. (0754) 20953 Fax. (0754) 20953
MUARO SIJUNJUNG (27511)

**PERNYATAAN REVIU
ATAS LAPORAN KINERJA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN SIJUNJUNG
TAHUN ANGGARAN 2023**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Muaro Sijunjung, 28 Maret 2024

Inspektur,



WANDRI FAHRIZAL, SH

Pembina Utama Muda

NIP.19710705 199803 1 011